

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION  
DALAM MENANGGULANGI MASALAH WOMEN TRAFFICKING DI INDIA**

**(2008-2013)**

**Oleh:**

**Yori Elfitriani<sup>1</sup>**

**(yori.elfitriani@ymail.com)**

**Pembimbing : Yuli Fachri, S.H, M.Si**

**Bibliografi : 4 Jurnal, 10 Buku, 1 Skripsi, 17 Internet,**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research aims to find out the role of International Organization for Migration (IOM) against women trafficking in India. IOM started its operations in India in the year 2001 to provide emergency relief in Gujarat when it was hit by an earthquake. While implementing the project in Gujarat, IOM was planning to expand its operations in India, it decided to work on the counter trafficking issue which was one of its mandated service areas. IOM, in close collaboration with Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA) has undertaken a number of initiatives. This research applies International Organization Role theory. The research method is descriptive with library research technique which use to collect and elaborate the information and data from the text books, papers, journals, and internet. The result of this research shows that the role of IOM against women trafficking in India is not effective. Trend of incidents of women trafficking is showing a steady rising during 2008-2013. The main cause why women trafficking increasing in India is poverty. According to the latest Millennium Development Goals report by the U.N, one third of the world's 1.2 billion poorest people live in India. Social inequality, regional gender preference, imbalance and corruption are the other leading causes of women trafficking in India. The Indian legal framework with respect to trafficking is severely flawed. While there are a large collections of statutes, existing international and regional conventions, active institutions, and a defined legal process that is designed to ensure that TIP offenders be prosecuted and TIP victims be protected, the legal framework is plagued by several weakness. The biggest problem remains in the implementation of the laws. Where laws are implemented, the penalties are not enough to deter trafficking or give adequate punishment.*

**Keywords:** *International Organization for Migration (IOM), Women Trafficking, India, Poverty, Social inequality, Gender Discrimination.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

## Pendahuluan

Penelitian ini merupakan salah satu studi kajian ilmu hubungan internasional yang akan mengeksplorasi peranan *International Organization for Migration* (IOM) di India dalam menanggulangi masalah perdagangan perempuan yang terjadi di negara tersebut. Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan terorganisir yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai *transnational crime*. Saat ini, kejahatan lintas negara, termasuk di dalamnya perdagangan manusia dianggap telah menjadi ancaman yang serius bagi keamanan global. Salah satu negara yang memiliki kasus perdagangan manusia terbanyak berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB adalah Negara India.<sup>2</sup>

India merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Negara ini merupakan salah satu negara yang paling cepat berkembang di dunia, tetapi juga merupakan rumah bagi jumlah terbesar anak-anak yang menderita kekurangan gizi. Bank Dunia melaporkan bahwa sekitar 32,7% dari populasi di India hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 68,7% dari mereka hidup dengan pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari.<sup>3</sup> Kemiskinan dan kelaparan terus melanda India yang berdampak pada semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Pemerintah belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah kematian yang disebabkan oleh kelaparan, perlakuan diskriminatif terhadap perempuan masih sering terjadi, dan presentase buta huruf juga masih sangat tinggi. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, serta

pelanggaran terhadap pekerja anak masih menjadi masalah yang tidak kunjung ditemukan upaya penyelesaiannya. Kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi kasus perdagangan manusia ke negara-negara tetangga maupun di dalam negeri India sendiri. Perempuan merupakan objek utama dari para *traffickers* dalam kegiatan perdagangan manusia tersebut.

Masalah perdagangan perempuan di India bukanlah hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang semakin berlarut-larut. Selama bertahun-tahun, India menjadi negara asal, transit, dan tujuan bagi perdagangan perempuan, baik untuk eksploitasi seksual komersial maupun untuk tenaga kerja paksa.

Perbudakan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh raja-raja dan tentara yang menguasai wilayah tersebut pada abad ke-17. Para penguasa mempertahankan otoritas mereka yang penduduknya terdiri dari perempuan-perempuan muda dan remaja pria yang sengaja mereka tangkap dari seluruh wilayah kerajaan. Eksploitasi seksual kerap terjadi karena hal ini dianggap sebagai hak aristokrasi. Pasar perbudakan ada di seluruh penjuru India dan terus berlanjut sampai abad kesembilan belas. Sebelum adanya larangan perbudakan di Inggris pada tahun 1843, pada akhir abad sembilan belas banyak ditemukan anggota keluarga yang sengaja dijual untuk membayar hutang.<sup>4</sup> Berbagai praktek sejarah kuno yang melegalkan perbudakan juga masih dipakai di India hingga saat ini, diantaranya adalah “sistem devadasi”, yang berarti pelayan dewa. Anak-anak perempuan sebelum memasuki usia pubertas akan “dinikahkan” dengan dewa-dewa di kuil desanya. Secara

<sup>2</sup><http://www.pikiran-rakyat.com/node/215199>.  
Diakses pada 1 Mei 2014

<sup>3</sup><http://www.mapsofindia.com/my-india/society/why-india-is-still-a-poor-nation>. Diakses pada 20 Oktober 2014

<sup>4</sup>Yusnarida Eka Nizmi, 2011. *Regionalisme dan Globalisme: kajian tematik: (perdagangan orang di berbagai belahan dunia)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru, hlm. 128

tidak langsung mereka didedikasikan sebagai pekerja seksual atas nama agama. Bentuk lain dari praktek yang melegalkan perbudakan di India adalah “begar”. Sistem begar merupakan alat untuk menjerumuskan orang dalam sistem hutang di India. Seseorang yang tidak mampu membayar hutang keluarganya secara otomatis akan menjadi budak sampai hutangnya terbayar. Praktek ini menggiring terjadinya perdagangan anak dan perempuan menjadi tenaga kerja paksa dalam pabrik pembuatan karpet, pertanian, dan perkebunan. Mereka bekerja sepanjang hari dengan kondisi yang tidak sehat dan sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual.

Sangat diperlukan peranan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini, tidak hanya dari pemerintah India itu sendiri, namun juga dari aktor internasional lainnya, seperti organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang aktif bekerjasama dengan pemerintah negara-negara di dunia untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia adalah *International Organization for Migration* (IOM).

IOM merupakan sebuah organisasi internasional yang berkomitmen untuk menciptakan migrasi yang tertib dan aman bagi para migran di seluruh dunia dengan bekerjasama dengan mitranya dalam masyarakat internasional. IOM didirikan pada tahun 1951, dan mulai beroperasi pada tahun 1952 dengan nama Komite antar Pemerintah untuk Migrasi Eropa (*Intergovernmental Committee for European Migration*). Pada tahun 1989, organisasi ini berubah nama menjadi *International Organization for Migration* (IOM) dan bermarkas di Jenewa, Swiss.

IOM memiliki anggota sebanyak 155 negara, dan 11 negara berstatus sebagai pengamat. IOM telah bekerja melawan

*human trafficking* sejak tahun 1994. Saat ini, terdapat lebih dari 800 program yang telah dilakukan oleh IOM di hampir lebih dari 100 negara. IOM juga telah memberikan bantuan kepada sekitar 200.000 orang yang diperdagangkan.<sup>5</sup> Bantuan yang diberikan oleh IOM tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan para perempuan, laki-laki, maupun anak-anak yang menjadi korban, serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah ini.

IOM memiliki satu perwakilan di setiap negara anggota, termasuk India. Berbagai bentuk kerjasama telah dilakukan oleh IOM dan pemerintah India. Sejak resmi menjadi anggota tetap IOM pada tahun 2008, IOM secara aktif membantu pemerintah India dalam menangani masalah perdagangan manusia. Berbagai program telah dibuat dengan harapan agar jumlah orang yang diperdagangkan setiap tahunnya semakin berkurang. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pekerja seks karena terlibat dalam *retrafficking*. Hal ini disebabkan karena hampir semua korban yang berhasil melarikan diri dari agen yang menjual mereka kembali dihadapkan pada masalah kemiskinan, kekerasan, bias gender, serta minimnya kesempatan ekonomi ketika mereka sampai di negara asal mereka. Akibatnya, mereka berhasil direkrut kembali oleh para agen penjual yang berbeda. Selain itu, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah India untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Akibatnya, setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah orang yang diperdagangkan.

---

<sup>5</sup><http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/history.html>. Diakses pada 20 Maret 2014

**Tabel 1. Kasus perdagangan manusia di India di bawah *Indian Penal Code* (2008-2013)**

No	Crime Head	Year					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Procurati on of minor girls (Sec. 366-A IPC)	224	237	679	862	809	1224
2	Importati on of girls from foreign country (Sec. 366-B IPC)	67	48	36	80	59	31
3	Selling of girls for prostituti on (Sec. 372 IPC)	49	57	130	113	108	100
4	Buying of girls for prostituti on (Sec. 373 IPC)	30	32	78	27	15	6
5	Immoral Trafficki ng (Preventi on) Act 1956	2659	2474	2499	2435	2563	2579
Total		3029	2848	3422	3517	3554	3940

Sumber: National Crime Records Bureau

Dalam penulisan penelitian ini, kerangka teoritik yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan teori peran oerorganisasi internasional dan konsep kerjasama. Menurut Stephen G. Walker, teori peranan dapat memberikan gambaran yang kaya akan kategorisasi kepercayaan, identitas individu atau kelompok, badan, dan menjelaskan sebuah nilai simbol interaksi atau metode pengertian teori peranan lebih kepada peran sebagai daftar tingkah laku yang diduga. Saat ini *Intergovernmental Organization* (IGO) memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu negara untuk mengatasi masalah global,

salah satunya adalah masalah *human trafficking*. Kerjasama internasional adalah sebuah hal yang sangat penting dan mutlak harus dilakukan oleh setiap negara. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam berbagai hal, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya keamanan, dan sebagainya. Kerjasama menurut K.J Holsti adalah sebagian besar transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, pemerintah India bekerjasama dengan IOM untuk menanggulangi masalah *women trafficking* yang terjadi di India. Sebagai salah satu organisasi internasional, IOM bertanggung jawab terhadap penanggulangan perdagangan perempuan di India, sebagai upaya dalam menghadapi ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

## Pembahasan

### Perkembangan *Women Trafficking* di India

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, telah menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di India. Kejahatan ini telah tumbuh subur dan berkembang sedemikian rupa di negara tersebut. Sebuah studi tahun 2006 menemukan fakta bahwa 378 dari 593 distrik di India telah dipengaruhi oleh perdagangan manusia. Diperkirakan bahwa

<sup>6</sup>K.J. Holsti, 1992. *Politik Internasional*. PT. Bina Cipta: Bandung, hlm. 209

90 persen dari perdagangan manusia di India dilakukan antar wilayah India<sup>7</sup>, dengan korban perdagangan sebagian besar digunakan untuk tenaga kerja paksa. Anak-anak dieksploitasi dengan berbagai cara, diantaranya adalah dipekerjakan di pabrik-pabrik, menjadi pembantu rumah tangga, dan pengemis. Sementara itu, kaum perempuan biasanya sangat rentan terhadap perdagangan untuk tujuan kawin paksa dan eksploitasi seksual komersial. *The 2013 Global Slavery Index*, yang diterbitkan oleh *the Australia-based Walk Free Foundation*, sebuah organisasi yang bekerja untuk mengakhiri perbudakan modern, menemukan bahwa hampir setengah dari 30 juta "budak modern" yang ada di dunia adalah berasal dari India.<sup>8</sup>

Di bagian barat ibukota India, New Delhi, lebih dari 5.000 agen penempatan pekerja rumah tangga beroperasi di sebuah daerah yang bernama Shakarpur Basti. Selama bertahun-tahun, agen-agen tersebut telah berkembang dengan pesat dengan terlibat dalam bisnis perdagangan perempuan dan menjual mereka sebagai budak rumah tangga di kota-kota. Agen-agen tersebut biasanya bekerja sama dengan penduduk asli yang berada di desa-desa terpencil India, dimana sebagian besar dari mereka berasal dari bagian timur India. Mereka dikenal sebagai "agen lokal" yang melaksanakan langkah pertama dalam proses perdagangan. Para agen tersebut mengidentifikasi perempuan di bawah umur dari keluarga yang sangat miskin dan memancing mereka untuk bekerja ke kota dengan tawaran gaji yang tinggi. Setelah perempuan-perempuan tersebut berada di

kota, agen menjual mereka dengan harga sekitar US \$ 120 kepada agen penempatan pekerja rumah tangga.<sup>9</sup> Agen ini kemudian kembali menjual perempuan-perempuan tersebut kepada sebuah keluarga untuk dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. Mereka bekerja selama 14 sampai 16 jam per hari dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari memasak sampai menjaga bayi. Mereka hampir tidak pernah dibayar. Seringkali upah bulanan mereka dibayarkan kepada agen, tidak kepada mereka. Sebagian besar dari perempuan-perempuan tersebut terjebak dalam keadaan ini selamanya. Mereka mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit dan tidak tahu bagaimana untuk kembali ke rumah. Selama bertahun-tahun, mereka dipindahkan dari satu rumah ke rumah lainnya. Bahkan banyak diantara mereka yang dieksploitasi secara seksual. Di India, sebagian besar perdagangan perempuan di bawah umur untuk eksploitasi seksual dilakukan antar wilayah India. Mereka diperdagangkan ke dan dari negara bagian seperti Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan dan Bengal Barat. Misalnya, diantara 23 distrik di negara bagian Andhra Pradesh, 16 diantaranya diidentifikasi sebagai sumber dari perempuan yang diperdagangkan. Demikian pula di negara bagian Bihar, dimana 24 dari 37 distrik sangat terpengaruh dalam perdagangan perempuan dan anak. Rajasthan juga merupakan sumber negara utama, dimana 27 dari 32 distrik ditemukan sebagai pemasok perempuan yang diperdagangkan.<sup>10</sup> Selain diperdagangkan di dalam negeri, mereka juga dipasok ke Thailand, Kenya, Afrika Selatan, Inggris, Korea Selatan, Filipina dan negara-negara Timur Tengah, seperti Bahrain, Dubai, serta

<sup>7</sup>Yusnarida Eka Nizmi, 2011. *Regionalisme dan Globalisme: kajian tematik: (perdagangan orang di berbagai belahan dunia)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru, hlm. 126

<sup>8</sup><http://www.womenundersiegeproject.org/blog/entry/silent-slaves-stories-of-human-trafficking-in-india>. Diakses pada 10 Februari 2015

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>ECPAT International, *Global Monitoring Report on India*. Diakses dari [www.ecpat.net](http://www.ecpat.net). Diakses pada 1 Mei 2014

Oman. Perbatasan yang terbuka dengan negara-negara di sekitarnya dianggap sebagai faktor penyebab semakin banyaknya perempuan yang diperdagangkan. ECPAT *International* memperkirakan bahwa 150.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya dari Asia Selatan, dimana sebagian besar diperdagangkan dari, melalui atau ke India.<sup>11</sup>

Perdagangan perempuan untuk pernikahan paksa juga sangat lazim terjadi di India. Setiap tahun, ribuan perempuan di India terpicat dengan tawaran pernikahan bahagia yang ditawarkan oleh laki-laki kaya di Punjab dan Haryana. Kebanyakan dari pengantin yang 'dibeli' tersebut dieksploitasi, ditolak hak-hak dasarnya, dijadikan sebagai pembantu, dan akhirnya ditinggalkan. Dengan perbandingan jenis kelamin yang berbeda (Punjab-893, Haryana-877 perempuan per 1000 laki-laki), maka tidak mungkin bisa menemukan pengantin untuk setiap laki-laki, sehingga satu-satunya solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan "mengimpor pengantin". Sebagian besar dari perempuan yang masuk ke pernikahan paksa berasal dari daerah-daerah miskin di India, seperti Assam, Bengal Barat, Jharkhand, Bihar dan Odisha. Setelah menikah, mereka biasanya dieksploitasi dan dijadikan sebagai pembantu rumah tangga oleh agen atau orang-orang yang menikahi dan membeli mereka.

## **Faktor Penyebab Terjadinya *Women Trafficking* di India**

### **Faktor Ekonomi**

Permasalahan kemiskinan di India telah menjadi momok yang sangat menakutkan. Kondisi kehidupan ekonomi

---

<sup>11</sup> *Ibid*

yang buruk menyebabkan banyak anak-anak dan perempuan di negara tersebut yang berhenti bersekolah dan kemudian ikut bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga, hal ini membuat mereka berada dalam situasi berbahaya dan sangat rentan masuk ke dalam *trafficking*.

Setelah lebih dari 50 tahun merdeka, India masih memiliki jumlah terbesar orang yang hidup dalam kemiskinan. Negara tersebut berada pada ranking ke-55 dari seluruh negara berkembang berdasarkan *Human Poverty Index*. India juga memiliki angka buta huruf yang cukup tinggi, yaitu 39 persen.<sup>12</sup> Sekitar 260,3 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 193.200.000 berada di daerah pedesaan, dan 67,1 juta berada di daerah perkotaan. Selain itu India juga memiliki angka kematian bayi terburuk, bahkan lebih buruk daripada Bangladesh dan Sri Lanka, yaitu sebesar 57 perseribu angka kelahiran.<sup>13</sup>

Kemiskinan sering disebut sebagai akar masalah *trafficking* terus tumbuh dan berkembang di India. Kemiskinan membuat perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, serta pengabaian hak-hak dasar sebagai manusia. Ketidakmampuan pemerintah dalam memberi jaminan kehidupan pada warga negaranya menyebabkan banyak dari mereka terutama perempuan yang bermigrasi dari daerah miskin India ke pusat-pusat kota untuk mencari pekerjaan. Para pelaku *human trafficking* biasanya mengeksploitasi situasi ini dengan merekrut perempuan-perempuan tersebut dengan upah yang sangat murah bahkan tidak diupah sama sekali. Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pekerja perempuan karena terlibat dalam *retrafficking*. Hampir semua

---

<sup>12</sup> [http://hdr.undp.org/en/media/hdr\\_tables\\_2006.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/hdr_tables_2006.pdf). Diakses pada 10 Februari 2015

<sup>13</sup> [http://www.unicef.org/infobycountry/india\\_statistic\\_s.html](http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistic_s.html). Diakses pada 10 Februari 2015

perempuan yang menjadi korban *trafficking* yang berhasil melarikan diri dihadapkan kembali pada kondisi kemiskinan, kekerasan, serta minimnya kesempatan ekonomi ketika mereka kembali ke daerah asalnya. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku *human trafficking* untuk kembali merekrut dan membuat kesepakatan untuk kedua kalinya dengan para korban. Inilah yang menjadi penyebab semakin sulitnya para korban untuk keluar dari lingkaran *trafficking*.

### Faktor Sosial

*Asian Development Bank* melaporkan bahwa kedudukan perempuan di tujuh negara di Asia Selatan berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak perempuan yang mengalami kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa diskriminasi dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, pembagian jatah makanan, dan dari semua itu yang paling mengerikan adalah kekerasan fisik dan seksual yang seringkali dialami oleh perempuan-perempuan di Asia Selatan, termasuk India.

Di India, para perempuan sudah terbiasa mengalami pemukulan, pemerkosaan, pengabaian hak-hak dasar mereka sebagai manusia, serta dieksploitasi oleh kaum pria. Di beberapa komunitas, perempuan yang berasal dari keluarga miskin dijadikan sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Hasil investasi dari UNIFEM menunjukkan bahwa ada 15.000 perempuan India dibunuh setiap tahunnya karena perselisihan dalam penetapan mas kawin

pada sebuah pernikahan yang dijodohkan.<sup>14</sup> Peristiwa ini dikenal dengan istilah “*dowry death*”. Sampai saat ini masyarakat India masih menerapkan adat yang membebankan mas kawin diberikan oleh pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria. Mas kawin ini dianggap sebagai pemberian seorang ayah terhadap anak perempuannya sebagai bentuk perlindungan bagi anaknya dari kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh suami atau mertua mereka.

Kejahatan mas kawin ini terjadi di semua kelas ekonomi masyarakat, bahkan mereka yang berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggipun masih mempersoalkan mas kawin. Pernikahan telah dikomersilkan menjadi transaksi bisnis ketika keluarga pria menuntut mas kawin yang sangat tinggi. Apabila keluarga pria merasa bahwa mas kawin yang diminta tidak sesuai, maka selama mas kawin tersebut belum terpenuhi, pengantin wanita akan menjadi korban kekerasan. Hal inilah yang membuat sebagian besar masyarakat India menolak untuk mempunyai anak perempuan, mereka bahkan membunuh atau menggugurkan kandungannya apabila diketahui bahwa anak yang dikandung adalah perempuan. Pada tahun 2006, UNICEF melaporkan bahwa 10 juta anak perempuan tewas, baik sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan.<sup>15</sup> Kelahiran anak perempuan seringkali dianggap sebagai beban, sedangkan kelahiran anak laki-laki dianggap membawa kemakmuran.

**Tabel 2. Kasus *dowry death* terhadap perempuan India tahun 2007-2013**

No	Year	The Dowry Prohibition Act, 1961
1	2007	5,623
2	2008	5,555

<sup>14</sup>United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 2005. *Not a Minute More*, New York: UNIFEM.

<sup>15</sup>[http://www.unicef.org/infobycountry/india\\_statistic\\_s.html](http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistic_s.html). Diakses pada 10 Februari 2015

3	2009	5.650
4	2010	5.182
5	2011	6.619
6	2012	9.038
7	2013	10.709

Sumber: National Crime Records Bureau

### Faktor Budaya

Salah satu sistem budaya India yang menjadi akar penyebab terjadinya perdagangan perempuan di India adalah sistem devadasi. Sistem ini telah berlangsung selama lebih dari dua ribu tahun. Menurut adat India kuno, anak-anak perempuan sebelum memasuki usia pubertas akan “dinikahkan” dan dipersembahkan dalam suatu pernikahan dengan dewa-dewa di kuil di desanya. Sekelompok masyarakat menilai sistem ini sebagai salah satu cara untuk melegalkan prostitusi yang dilakukan oleh para pendeta dengan menggunakan pengaruh agama, dimana para perempuan yang terlibat di dalamnya tidak lain hanyalah budak-budak nafsu. Sebagai devadasis, mereka diharuskan untuk memberikan seluruh hidup mereka untuk melayani dan tidak diperbolehkan menikah. Sama halnya seperti *geisha* di Jepang, perempuan yang menjadi devadasis ini pada dasarnya adalah seorang seniman yang pandai menari, menyanyi, dan kemudian memberikan layanan seksual kepada para pendeta, penghuni kuil, dan tuan tanah. Para devadasis percaya bahwa apa yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk dari pengabdian terhadap para dewa.

Devadasi memiliki sebutan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Misalnya di Maharashtra, mereka dikenal dengan nama *Muralis*, sedangkan di Andhra Pradesh mereka disebut *Jogini*. Di Assam, mereka dikenal dengan nama *Natis*, *Maharis* di Kerala, dan *Thevardiyar* di Tamil Nadu. Sedangkan di Goa mereka disebut *Bhavanis*, *Basavi* di Karnataka, dan lain sebagainya. Devadasi yang sudah berusia lanjut yang

berada di daerah Karnataka disebut *Jogati*, sedangkan yang masih muda disebut *Basavi*. Ciri khas yang membedakan para devadasis dengan perempuan pada umumnya adalah bisa dilihat dari sebuah kalung panjang yang dihiasi oleh gambar Dewa Yellama, serta gelang kaki yang terbuat dari tembaga yang mereka kenakan.

### Faktor Hukum

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia dalam melawan perdagangan manusia adalah persoalan hukum dan penerapan hukum. Lemahnya keinginan menerapkan hukum untuk melawan perdagangan manusia menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah kasus kejahatan perdagangan manusia setiap tahunnya. Di India, *The Immoral Trafficking Act* 1956 yang kemudian diubah menjadi *Immoral Trafficking Prevention Act* (ITPA) tahun 1986 telah dikeluarkan oleh pemerintah India untuk memberantas *trafficking*. Undang-undang ini mengatur tentang hukuman yang akan diberikan kepada mucikari dan pendirian rumah bordir. Meskipun aturan hukumnya sudah ada, namun ironisnya mucikari dan rumah bordir sampai saat ini masih bisa ditemui di seluruh daerah di India. Jumlah pemberlakuan hukuman di bawah undang-undang *trafficking* masih sangat minim. Pemilik rumah pelacuran menerima hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun dan membayar denda maksimal empat puluh dollar. Sementara itu, mucikari juga menerima hukuman yang sama dengan pemilik rumah pelacuran, tetapi tidak ada denda atas perbuatan perdagangan seks.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Yusnarida Eka Nizmi, 2011. *Regionalisme dan Globalisme: kajian tematik: (perdagangan orang di berbagai belahan dunia)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru, hlm. 133

Praktek-praktek peradilan di India juga kerap berbenturan dengan undang-undang resmi dan hukum kebiasaan yang justru sering menempatkan para korban perdagangan manusia beresiko mendapatkan hukuman. Selain itu, laporan riset juga mencatat bahwa agensi-agensi kepolisian memiliki prioritas rendah dalam menangani isu-isu perdagangan manusia dan semua aparat terkenal kurang sensitif terhadap persoalan tersebut. Sebagai tambahan, berulang kali perempuan-perempuan yang diperdagangkan yang ditangkap oleh aparat kepolisian justru mengalami pelecehan dengan berbagai cara.<sup>17</sup>

Tindakan pihak kepolisian India dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan manusia sangat tergantung pada keinginan mereka dalam menyikapi setiap laporan yang diberikan oleh masyarakat. Berbagai laporan yang diterima oleh pihak kepolisian seringkali dikategorikan sebagai laporan orang hilang, sehingga sangat tidak mungkin untuk ditangani oleh pengadilan atau pihak lain selain kepolisian. Investasi polisi sangat jarang sekali berlanjut pada tempat dimana korban ditemukan, sehingga para pelaku perdagangan manusia tersebut mudah terbebas dari hukum. Meskipun demikian, sebenarnya polisi mempunyai bukti yang sangat jelas mengenai kelompok-kelompok kejahatan terorganisir dan terlibat dalam penjualan manusia, namun polisi sangat jarang menginvestasi jaringan ini.

### **Upaya Pemerintah India dalam Menanggulangi Masalah *Women Trafficking***

Instrumen hukum utama yang menangani masalah perdagangan manusia di India adalah *The Immoral Trafficking Act* 1956, yang kemudian diubah namanya

menjadi *Immoral Trafficking and Prevention Act* (ITPA) pada 1986. ITPA difokuskan pada perdagangan untuk tujuan prostitusi. Undang-undang ini melarang pendirian rumah bordil; hidup dari pendapatan dengan menjadi pelacur; penyediaan, mendorong atau pengambilan seseorang untuk prostitusi; dan menahan orang di tempat dimana prostitusi terjadi.<sup>18</sup> Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang upaya penyelamatan dan rehabilitasi korban perdagangan, serta menindak para pelaku eksploitasi dan meningkatkan hukuman bagi pelanggaran perdagangan yang melibatkan anak-anak. Selain *Immoral Trafficking and Prevention Act* (ITPA) 1956, India juga mempunyai peraturan perundangan lainnya yang juga terkait dengan perdagangan manusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Indian Penal Code* (IPC). Sebagian aturan yang ada di dalam IPC mengandung berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan anak. Peraturan ini mengatur tindakan seperti pengadaan, pembelian dan penjualan manusia, mengimpor atau mengekspor perempuan untuk tujuan perbudakan, membeli dan menjual anak di bawah umur untuk prostitusi, memaksa pernikahan anak di bawah umur, penculikan menggunakan kekerasan untuk tujuan perdagangan, serta tenaga kerja paksa yang melanggar hukum.

2. *The Prohibition of Child Marriage Act* (2006). Undang-undang ini juga berusaha untuk mengatasi masalah perdagangan anak dan pernikahan anak di bawah umur, dengan terlibat dalam promosi pemberian hukuman kepada para pelaku pernikahan anak (Pasal 11), dan dengan membuat pernikahan anak batal dan tidak berlaku jika diketahui bahwa anak tersebut dinikahkan untuk tujuan perdagangan (Pasal 12 (b) dan (c)).

<sup>17</sup><http://www.merineews.com/catFull.jsp?articleID=131079>. Diakses pada 10 Februari 2015

<sup>18</sup>Immoral Trafficking Prevention Act (1956), Sections 3, 4, 5 and 6.

3. *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (JJA)*. Undang-undang ini berisi berbagai larangan tindak kekerasan terhadap anak; mempekerjakan seorang anak untuk mengemis; memberikan obat-obatan narkotika atau psiktropika kepada anak; dan memaksa anak untuk bekerja di pekerjaan yang berbahaya.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan anak-anak menurut undang-undang ini adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun.

4. *Child Labour (Prohibition & Regulation) Act*. Undang-undang ini melarang mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun di pekerjaan yang berbahaya. Beberapa pekerjaan yang dilarang menurut undang-undang ini adalah bekerja di pabrik karpet tenun, pekerjaan konstruksi dan bangunan, pembakaran batu bata, produksi barang kaus kaki, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di restoran-restoran pinggir jalan, dan lain-lain.

5. *The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976*. Undang-Undang ini berisi penghapusan sistem buruh kontrak dengan maksud untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan fisik buruh.

*Ministry of Women and Child Development (MWCD)* adalah departemen utama di India yang memberikan perhatian yang besar dalam menanggulangi masalah *human trafficking*, khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak untuk eksploitasi seksual komersial. Dalam kerjanya, departemen ini bekerjasama dengan *Ministry of Home Affairs (MHA)*, *Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA)*, *Ministry of External Affairs (MEA)* dan *Ministry of Labour and Employment*.

MHA menangani semua hal yang berkaitan dengan penegakan hukum,

---

<sup>19</sup>Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act (2000), Sections 23, 24, 25 and 26.

khususnya mengenai *Immoral Trafficking (Prevention) Act (ITPA)* dan *Indian Penal Code (IPC)*. Selain itu, MHA juga membawahi beberapa lembaga penegak hukum khusus, seperti *Central Bureau of Investigation (CBI)*, *Border Security Force (BSF)*, dan *National Bureau for Crime Records*, yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai statistik kejahatan yang terjadi. MEA berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan perjanjian internasional dan protokol yang menyangkut *trafficking*, serta memberikan perhatian dan dukungan kepada korban perdagangan lintas batas. Sementara itu, MOIA menangani isu-isu yang berkaitan dengan masalah migrasi, dengan fokus khusus pada pencegahan migrasi yang tidak aman. *Ministry of Labour and Employment* fokus pada semua hal yang berkaitan dengan pengakuan undang-undang tenaga kerja, rehabilitasi, dan pemulangan pekerja anak.

### **Peran IOM dalam Menanggulangi Masalah *Women Trafficking* di India**

IOM memulai operasinya di India pada tahun 2001 untuk memberikan bantuan darurat di Gujarat ketika daerah tersebut dilanda gempa. Sejak India resmi menjadi anggota IOM pada tahun 2008, IOM mulai aktif terlibat dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah India pada manajemen migrasi, dengan fokus yang kuat pada migrasi tenaga kerja. IOM juga memastikan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mengatasi terjadinya migrasi tidak teratur. Selanjutnya, IOM bekerjasama dengan *Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA)* mendirikan *Migrant Resource Centres (MRC)* yang digunakan untuk melayani dan sebagai pusat bagi semua masalah yang berkaitan dengan migran, serta untuk mengatur kampanye pemberian informasi kepada masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah mengenai migrasi yang aman dan legal dan resiko migrasi tidak teratur.

IOM India juga mempromosikan dialog melalui lokakarya dan seminar regional tentang topik-topik yang terkait dengan migrasi, mengatur informasi dan program pelatihan bagi berbagai pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi dan menilai keterampilan para migran yang potensial di daerah.

Berbagai program yang dilaksanakan oleh IOM India diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif pengembangan keterampilan untuk migrasi yang potensial dari Utara dan Timur India. Proyek ini merupakan inisiatif yang didanai sepenuhnya oleh *Ministry of Overseas Indian Affairs* (MOIA) untuk meningkatkan kemampuan kerja global pemuda dari daerah melalui pembangunan kapasitas dan pembangunan keterampilan.

2. *Essentials of Migration Management*. Proyek ini dibiayai oleh *IOM Development Fund* (IDF) yang bertujuan untuk memperkuat manajemen migrasi di India. Proyek ini dibangun untuk mendorong terjadinya kerjasama migrasi melalui dialog yang berkelanjutan bagi para pembuatan kebijakan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemangku kepentingan di bidang migrasi internasional.

3. *Training of trainers on awareness raising on safe migration and pre-departure orientation*. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk melatih sekelompok LSM di negara-negara bagian India yang menjadi pengirim tenaga kerja terbesar, seperti Haryana, Andhra Pradesh dan Kerala yang akan mampu memfasilitasi penyebaran informasi di antara para calon migran mengenai resiko dan bahaya migrasi tidak teratur.

4. Kampanye pemberian informasi tentang resiko migrasi tidak teratur ke Belgia, dilaksanakan di distrik Jalandhar Punjab

Tahap I dan II. Proyek ini didanai oleh Pemerintah Belgia. Kampanye ini dilaksanakan oleh IOM bekerjasama dengan MOIA, di distrik Jalandhar Punjab, untuk meningkatkan kesadaran di antara para calon migran mengenai migrasi yang aman dan legal.

5. Program regional dan dialog tentang memfasilitasi migrasi yang aman dan legal dari Asia Selatan ke Uni Eropa yang didanai oleh Komisi Eropa (2007 - 2009 dan 2009 - 2011). Proyek yang didanai oleh Komisi Eropa ini dilaksanakan secara bersama oleh IOM dan *Ministry of Overseas Indian Affairs* (MOIA) di New Delhi dari bulan September 2007 sampai Januari 2009 dan Maret 2009 sampai Juni 2011.

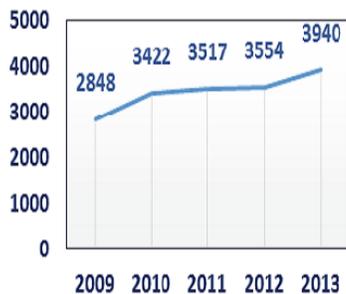
6. *Prevention and Assistance to Survivors of Trafficking* (PAST). Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan 300 (potensial) korban perdagangan melalui rehabilitasi ekonomi. Ini termasuk bantuan kredit mikro untuk mendirikan usaha yang layak dan pemberian kesempatan kerja, peningkatan kapasitas dan berbagai pelatihan dalam keterampilan kewirausahaan dan pemasaran.

7. *Technical Cooperation with Ministry of Women and Child Development on Prevention and Assistance to Survivors of Trafficking* (TCPA). Proyek ini didanai oleh Departemen Luar Negeri AS, *Bureau of Population, Refugees and Migration* (PRM). Proyek ini mengedepankan konsep kemitraan publik-swasta dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di India.

Berbagai program di atas dibuat oleh IOM untuk memberikan bantuan kepada para korban perdagangan manusia dan untuk mengurangi jumlah perempuan yang diperdagangkan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Data yang dikeluarkan oleh *National Crime Berau Records* India menunjukkan bahwa telah terjadi

kecenderungan peningkatan jumlah perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia sejak tahun 2009 sampai tahun 2013.

**Gambar 1. Kecenderungan Peningkatan Jumlah Korban *Human Trafficking* tahun 2009-2013**



Sumber: *National Crime Records Bureau*

Peningkatan jumlah tersebut terjadi karena mayoritas dari korban perdagangan manusia tersebut terlibat dalam *retrafficking*. Hal ini disebabkan karena hampir semua korban yang berhasil melarikan diri dari agen yang menjual mereka kembali dihadapkan pada masalah kemiskinan, kekerasan, bias gender, serta minimnya kesempatan ekonomi ketika mereka sampai di negara atau daerah asal mereka. Hingga saat ini, sekitar 260,3 juta orang India hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 193.200.000 berada di daerah pedesaan, dan 67,1 juta berada di daerah perkotaan. Selain itu India juga memiliki angka kematian bayi terburuk, bahkan lebih buruk dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Bangladesh dan Sri Lanka, yaitu sebesar 57 perseribu angka kelahiran.<sup>20</sup> Kedudukan perempuan di India berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga semakin banyak perempuan yang mengalami kekerasan, baik secara langsung

<sup>20</sup>[http://www.unicef.org/infobycountry/india\\_statistic\\_s.html](http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistic_s.html). Diakses pada 10 Februari 2015

maupun tidak langsung berupa diskriminasi dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, pembagian jatah makanan, dan dari semua itu yang paling mengerikan adalah kekerasan fisik dan seksual.

Sistem kasta yang dianut oleh masyarakat di India juga turut menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah perdagangan manusia di negara tersebut. Di beberapa komunitas di India, perempuan yang berasal dari keluarga miskin dijadikan sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Sistem kasta ini juga berkaitan erat dengan praktek devadasi, dimana anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga dengan kasta terbawah sebelum memasuki usia pubertas akan “dinikahkan” dan dipersembahkan dalam suatu pernikahan dengan dewa-dewa di kuil di desanya. Praktek devadasi ini dinilai sebagai salah satu cara untuk melegalkan prostitusi yang dilakukan oleh para pendeta dengan menggunakan pengaruh agama, dimana para perempuan yang terlibat di dalamnya tidak lain hanyalah budak-budak nafsu. Sebagai devadasis, mereka diharuskan untuk memberikan seluruh hidup mereka untuk melayani dan tidak diperbolehkan menikah. Komisi Nasional Perempuan India melaporkan bahwa saat ini terdapat 48.358 orang devadasis di seluruh India.<sup>21</sup>

Selain itu, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah India untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia juga tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Pemilik rumah pelacuran menerima hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun dan membayar denda maksimal empat puluh dollar. Sementara itu, mucikari juga menerima hukuman yang sama dengan

<sup>21</sup><http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jan/21/devadasi-india-sex-work-religion>, diakses pada 18 Maret 2015

pemilik rumah pelacuran, tetapi tidak ada denda atas perbuatan perdagangan seks.<sup>22</sup> Praktek-praktek peradilan di India juga kerap berbenturan dengan undang-undang resmi dan hukum kebiasaan yang justru sering menempatkan para korban perdagangan manusia beresiko mendapatkan hukuman. Selain itu, berbagai laporan yang diterima oleh pihak kepolisian India seringkali dikategorikan sebagai laporan orang hilang, sehingga sangat tidak mungkin untuk ditangani oleh pengadilan atau pihak lain selain kepolisian. Investasi polisi sangat jarang sekali berlanjut pada tempat dimana korban ditemukan, sehingga para pelaku perdagangan manusia tersebut mudah terbebas dari hukuman. Meskipun pemerintah India mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perdagangan manusia, namun tantangan dari faktor kemiskinan, bias gender, perbudakan, dan perdagangan seks akan sulit untuk diakhiri. Hal ini menyebabkan terus meningkatnya jumlah orang, khususnya perempuan yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia setiap tahunnya.

## Simpulan

Perdagangan perempuan berarti setiap usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transfer, pengiriman atau penerimaan seorang perempuan dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman dan kekerasan dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar maupun tidak, untuk bekerja pada pekerjaan yang tidak diinginkan, dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal. Pada tahun 2009, IOM

melaporkan bahwa secara global perdagangan manusia di seluruh dunia telah menimbulkan korban 4 sampai enam ratus juta orang setiap tahunnya. Mayoritas dari korban perdagangan manusia itu dalam bidang seks, dan sekitar 70 persen dari korban perdagangan seks tersebut adalah perempuan. Di Asia, perdagangan perempuan dan anak-anak untuk eksploitasi seksual sendiri telah menimbulkan korban lebih dari 30 juta orang, dimana setiap harinya sekitar 200 anak perempuan dan perempuan di India masuk prostitusi dan 80% dari mereka bertentangan dengan keinginan mereka.

Saat ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan India pada kelompok Tier 2, dimana pemerintah India dianggap tidak mampu memenuhi standar-standar minimum *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA), namun berupaya untuk memenuhi standar-standar tersebut. Sebelumnya, India pernah ditempatkan pada kelompok Tier 2 *Watch List* karena dianggap tidak mempunyai itikad baik untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia. Untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan di India sangat diperlukan peranan dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah India itu sendiri, namun juga dari aktor internasional lainnya, seperti organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang aktif bekerjasama dengan pemerintah negara-negara di dunia untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia adalah *International Organization for Migration* (IOM). Sebagai organisasi internasional yang berkomitmen untuk menciptakan migrasi yang tertib dan aman bagi para migran di seluruh dunia dengan bekerjasama dengan mitranya dalam masyarakat internasional, maka IOM bertanggung jawab terhadap penanggulangan perdagangan manusia di India sebagai respon menghadapi ancaman bahaya dari kejahatan ini.

---

<sup>22</sup>Yusnarida Eka Nizmi, 2011. *Regionalisme dan Globalisme: kajian tematik: (perdagangan orang di berbagai belahan dunia)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru, hlm. 133

IOM memainkan perannya sebagai organisasi internasional dengan melakukan beberapa fungsi serta asistensi untuk menangani masalah perdagangan perempuan di India. Peran asistensi IOM terhadap perdagangan perempuan di India diantaranya adalah bekerjasama dengan *Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA)* mendirikan *Migrant Resource Centres (MRC)* yang digunakan untuk melayani dan sebagai pusat bagi semua masalah yang berkaitan dengan migran, serta untuk mengatur kampanye pemberian informasi kepada masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah mengenai migrasi yang aman dan legal dan resiko migrasi tidak teratur. IOM India juga mempromosikan dialog melalui lokakarya dan seminar regional tentang topik-topik yang terkait dengan migrasi, mengatur informasi dan program pelatihan bagi berbagai pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi dan menilai keterampilan para migran yang potensial di daerah. Selain itu, IOM juga melaksanakan proyek yang diberi nama *Prevention and Assistance to Survivors of Trafficking (PAST)*. Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan 300 (potensial) korban perdagangan melalui rehabilitasi ekonomi. Ini termasuk pemberian bantuan kredit mikro untuk mendirikan usaha yang layak dan pemberian kesempatan kerja, peningkatan kapasitas dan berbagai pelatihan dalam keterampilan kewirausahaan dan pemasaran. IOM juga bekerjasama dengan salah satu LSM di Goa yang bernama Anyay Rahit Zindagi (ARZ). ARZ merupakan sebuah LSM yang bekerja untuk penyelamatan, perlindungan, pencegahan, rehabilitasi korban dan korban *trafficking* dan penuntutan terhadap para pelaku. Proyek ini dikenal dengan nama 'Swift Wash'. 'Swift Wash' adalah model yang paling tepat dari kemitraan publik-swasta dan rehabilitasi masyarakat yang menampilkan kejelasan dalam hal peran dan

tanggung jawab dari masing-masing pengambil kebijakan yang berkontribusi terhadap pencegahan dan rehabilitasi korban *trafficking*.

Berbagai program tersebut dibuat oleh IOM dengan harapan agar jumlah perempuan yang diperdagangkan setiap tahunnya semakin berkurang. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pekerja seks karena terlibat dalam *retrafficking*. Hal ini disebabkan karena hampir semua korban yang berhasil melarikan diri dari agen yang menjual mereka kembali dihadapkan pada masalah kemiskinan, kekerasan, bias gender, serta minimnya kesempatan ekonomi ketika mereka sampai di negara atau daerah asal mereka. Akibatnya, mereka berhasil direkrut kembali oleh para agen penjual yang berbeda. Selain itu, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah India untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Akibatnya, setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah perempuan yang diperdagangkan.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal**

- Mohammad Irvan Oli, 2005. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan, Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 4, No. 1.
- M. Saeri, 2012. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional "Transnasional"*. Vol. 3, No. 2.
- Rita Maran, 2000. "Perspectives on International Humann Rights Law and

Traditionalism". *Jurnal GLOBAL*. Vol. 1 No. 6.

Yessi Olivia, 2012. "Perkembangan Studi Hubungan Internasional". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* "Transnasional". Vol. 3, No. 2.

### **Buku**

Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: Allen & Unwid Ltd.

Barkin, J. Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmilan.

Griffiths, Marthin dan Terry O'Callaghan. 2002. *International Relation: The Key Concepts*. London and New York: Routlage.

K.J. Holsti. 1992. *Politik Internasional*. Bandung: PT. Bina Cipta.

Mingst, Karen. 1999. *Essentials of International Relations*. New York: W.W. Norton & Company.

Touzenis, Kristina. 2010. *Trafficking in Human Beings*. Paris: UNESCO.

Viotti, Paul R dan Mark V. Kauppi. 1998. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, dan Beyond*. Boston: Allyn and Bacond.

Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Winarno Surakmat. 1968. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Badan penerbit IKIP.

Yusnarida Eka Nizmi. 2011. *Regionalisme dan Globalisme: kajian tematik: (perdagangan orang di berbagai belahan dunia)*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.

### **Skripsi**

Dian Wahyu Aretti Nst. 2013. *Peran End Child Prostitution In Asian Tourism (ECPAT) dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di India 2002-2011*. Skripsi (S1). Universitas Riau. Pekanbaru.

### **Internet**

BBC News. 2014. *Ten 'big facts' about India*. (<http://www.bbc.com/news/world-asia-25881705>) (12 Maret 2014).

Central Intelligence Agency. 2014. *The World Fact Book: India* (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html>) (12 Maret 2014).

\_\_\_\_\_. 2011. *US moves India to Tier 2 of human trafficking index*. (<http://indiatoday.intoday.in/story/us-moves-india-to-tier-2-of-human-trafficking-index/1/142956.html>) (12 Maret 2014).

\_\_\_\_\_. 2011. *Trafficking: India's record improves, says US State Department*. (<http://www.ndtv.com/article/india/trafficking-india-s-record-improves-says-us-state-department-115231>) (12 Maret 2014).

ECPAT International. 2014. *Global Monitoring Report on India*. ([www.ecpat.net](http://www.ecpat.net)) (1 Mei 2014).

- Global Citizens Trust. 2009. “*India biggest market for trafficked Nepali women*” Zee News June 17. ([http://zeenews.india.com/news/nation/india-biggest-market-for-trafficked-nepali-women\\_539987.html](http://zeenews.india.com/news/nation/india-biggest-market-for-trafficked-nepali-women_539987.html)) (12 Maret 2014).
- International Organization for Migration (IOM). 2014. *History*. (<http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/history.html>) (20 Maret 2014).
- \_\_\_\_\_. 2013. *Crime in India*. (<http://ncrb.gov.in/>) (20 Maret 2015).
- Peace Palace Library. 2014. *Transnational Crime*. (<http://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-criminal-law/transnational-crime/>) (1 Mei 2014).
- Pikiran Rakyat Online. 2012. *Perdagangan Manusia di Dunia Memprihatinkan*. (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/215199>) (1 Mei 2014).
- Priyali Sur. 2013. *Silent Slave: Stories of Human Trafficking in India*. (<http://www.womenundersiegeproject.org/blog/entry/silent-slaves-stories-of-human-trafficking-in-india>) (10 Februari 2015).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Stop trafficking and oppression of women and children*. (<http://www.stop-india.org/>) (10 Februari 2015).
- UNICEF. 2014. *Statistics*. ([http://www.unicef.org/infobycountry/india\\_statistics.html](http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html)) (10 Februari 2015).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2009. *Human trafficking fuels violence against women*. (<http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2009/November/human-trafficking-fuels-violence-against-women.html>) (20 Maret 2014).
- U.S. Department of State. 2013. *Tier Placements*. (<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210548.htm>) (20 Maret 2014).
- \_\_\_\_\_. 2006. ‘*Project Combat*’ launched to eradicate ‘*Devadasi*’ system. (<http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp>) (20 Maret 2015).
- \_\_\_\_\_. 2015. *The Number Story: A human trafficking cases rise, convictions come down*. (<http://indianexpress.com/article/india/india-others/the-numbers-story-a-human-trafficking-cases-rise-convictions-come-down/>) (21 Maret 2015).